

PERBANDINGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM RUANG LINGKUP DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR)

Shafira Fajriah Arrozi, Salsa Adellia Pratiwi, Dhea Maulidya

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Perbandingan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia merupakan bidang penelitian menarik karena perbedaan konteks sejarah, budaya, dan pendidikan yang ada di kedua negara tersebut. Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang persamaan dan perbedaan antara sistem pendidikan di kedua negara tersebut. Pertama, artikel ini menjelaskan terkait definisi serta permasalahan penyelenggaraan pendidikan dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang menjadi dasar perbandingan akan kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Meskipun kedua negara telah membuat kemajuan dalam hal akses dan partisipasi pendidikan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta ketimpangan antara kelompok sosial-ekonomi. Kedua, artikel ini mengadakan perbandingan terkait struktur dan sistem pendidikan di kedua negara. Meskipun ada beberapa kesamaan, seperti adanya pendidikan dasar dan menengah yang wajib, tetapi terdapat perbedaan signifikan dalam hal pendekatan pembelajaran, bahasa pengantar, dan isi kurikulum. Dengan memahami perbandingan sistem pendidikan antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara dapat saling bertukar informasi dan pengalaman guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, bermutu, dan berkelanjutan untuk masa depan anak-anak dan generasi mendatang.

Kata Kunci: Indonesia, Malaysia, Sistem Pendidikan, Perbandingan Pendidikan, Kebijakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Sebagai pondasi pembangunan sebuah negara, pendidikan memberikan akses bagi warganya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Ketiga hal tersebut menjadi kunci penting dalam persaingan bangsa pada era ekonomi bebas ASEAN saat ini. Pendidikan memiliki peran vital dalam mempersiapkan generasi muda untuk mencapai ketiga elemen yang menentukan daya saing sebuah bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional

adalah sebuah sistem yang dijalankan oleh negara dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa dalam menentukan arah dan masa depannya.¹

Dalam konteks dinamika globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin intensif, sistem pendidikan sebuah negara menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara tetangga di wilayah Asia Tenggara, keduanya memiliki perbedaan dalam sejarah, budaya, dan konteks pendidikan mereka. Meskipun demikian, terdapat juga persamaan antara kedua negara ini dalam berbagai aspek, termasuk tantangan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Perbandingan antara sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia menjadi penting untuk dipertimbangkan, mengingat perlunya memahami kesamaan dan perbedaan demi merancang kebijakan pendidikan yang sesuai dan efektif bagi kedua negara ini ke depan. Dalam konteks ini, kami akan mengeksplorasi evolusi pendidikan di Indonesia dan Malaysia, perbedaan dalam sistem pendidikan, tantangan yang dihadapi di wilayah 3T, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di kedua negara. Dengan memahami lebih baik sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia, diharapkan kita dapat belajar dari pengalaman ini dan menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kedua negara.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan literature review. Menurut Cooper, (2016), pendekatan literatur review bertujuan untuk menyajikan kesimpulan yang telah ditarik dari studi-studi sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. Karya-karya terdahulu yang dikumpulkan dan di analisis berupa jurnal-jurnal nasional dan internasional. Analisis isi dibatasi pada konsep dinamika pendidikan secara umum di Indonesia dan Malaysia secara khusus. Data yang dikumpulkan kemudian dipilih dan diklasifikasikan sesuai kebutuhan untuk dianalisis. Data yang diperoleh berupa perkembangan pendidikan di Indonesia dan Malaysia kemudian dikomparasikan sehingga menghasilkan analisis pelaksanaan pendidikan di kedua negara.

¹ Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, (Rajawali Press, Jakarta, 2010) 50-51

C. PEMBAHASAN

1. Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)

Menurut data yang ada Indonesia memiliki kurang lebih 1.700 pulau.² Pulau-pulau terpisah ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masa depan negara Indonesia. Hambatan geografis ini menimbulkan permasalahan dalam menyediakan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Pendidikan merupakan kekuatan pendorong di balik pembangunan sosial dan ekonomi di negara mana pun. Mengingat luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis dan sosial budaya sangat heterogen, maka masih banyak permasalahan yang berbeda dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Khususnya di wilayah perbatasan, wilayah terluar, dan wilayah yang tergolong daerah tertinggal (daerah 3T).³

Kriteria berdasarkan enam pendekatan digunakan untuk mengidentifikasi daerah tertinggal: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, kekuatan fiskal daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.⁴ Kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di daerah tertinggal dengan menyelaraskan, memajukan dan memperkuat masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Program prioritas pemerintah pusat dan daerah antara lain pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kawasan perbatasan untuk mengurangi keterisolasian, penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas, dan kebencanaan serta pencegahan dan rehabilitasi.

Sumber pendanaan pembangunan daerah tertinggal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana swasta dan daerah, serta dana pendapatan daerah lainnya. Para pemangku kebijakan, baik pusat maupun daerah, harus memastikan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan situasi, kondisi dan karakteristik masing-masing daerah, agar dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan berkelanjutan dalam aspek

² “Jumlah Pulau di Indonesia - Ruang Opini - Dewan Ketahanan Nasional - dkn.go.id,” diakses 8 April 2024, <https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html>.

³ Asep Mahpudz, Amiruddin Kade, dan Harudin Haerudin, “Analisis Kebijakan Dan Kelayakan Mutu Tenaga Pendidik Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Tengah,” *Media Litbang Sulteng* 2, no. 2 (21 Februari, 2012): hal. 3, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/MLS/article/view/52>.

⁴ Handoko Arwi Hasthoro dan Nanik Ambarwati, *AnalisisSebaran Guru Dikdasmen di Wilayah 3 T (Terluar, Terdepan Dan Tertinggal): Tinjauan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)*, 14.

sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus dalam penyediaan kurikulum di daerah ini, khususnya di bidang pendidikan dasar.

Lebih lanjut, tujuan utama pembangunan dalam Pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (KKDT) adalah untuk mengurangi kesenjangan wilayah antara Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur.⁵ Daerah tertinggal dengan daerah tertinggal, dan daerah perbatasan dengan wilayah negara tetangga. Kawasan rawan bencana dan penataan ruang harus menjadi landasan utama pembangunan terpadu untuk mengurangi potensi risiko bencana, konflik kepentingan, pembangunan antardaerah dan lintas sektoral, yang hakekatnya pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi Indonesia.

Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T secara umum mencakup permasalahan pendidikan seperti kekurangan guru, distribusi yang tidak merata, kualifikasi di bawah standar mutu, kurangnya kemampuan, dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang sasaran. Tantangan lain dalam penyelenggaraan pendidikan adalah angka putus sekolah yang masih tinggi, angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta infrastruktur yang memberikan kemudahan akses terhadap pendidikan yang masih sangat buruk.

2. Perbandingan Pendidikan Indonesia dan Malaysia

Pendidikan bagi suatu bangsa menduduki peran sangat penting. Pendidikan merupakan pilar bagi pembangunan peradaban negara, ia membuka jalan bagi warganya untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Tiga aspek itulah yang pada era perekonomian bebas ASEAN ini menjadi penentu daya saing bangsa. Pendidikan memiliki peran dalam mengantarkan generasi muda dalam meraih pencapaian tiga unsur daya saing bangsa tersebut. Oleh sebab itu pendidikan nasional merupakan suatu sistem yang diselenggarakan oleh suatu negara kebangsaan atau negara nasional dalam rangka mewujudkan hak menentukan nasib sendiri bangsa.⁶

Dalam Pendidikan maka akan tercapai suatu tujuan yang merupakan landasan bagi suatu bangsa untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas, berpikir kritis, dan menciptakan SDM yang berkualitas. Maka dari itu, diperlukannya dukungan dan sistem dari suatu negara itu sendiri untuk berfokus pada pendidikan bangsanya.

⁵ Hasthoro dan Ambarwati, Analisis Sebaran Guru

⁶Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, (Rajawali Press, Jakarta, 2010), 50-51

Dalam konteks perbandingan pendidikan Indonesia bisa membandingkannya dengan Malaysia dikarenakan kedua negara tersebut merupakan bagian dari negara ASEAN dan juga merupakan negara yang masih berkembang.

Sistem pendidikan yang dimiliki oleh sekolah di Malaysia yaitu dengan sistem kebahasaannya yang mewajibkan bahasa Inggris dan bahasa Melayu, sedangkan di Indonesia sendiri hanya mewajibkan bahasa Indonesia.

Pendidikan di Malaysia pada dasarnya mengadopsi sistem dari negara Inggris sebab Malaysia merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris. Hal ini yang menyebabkan Malaysia maju di bidang pendidikan, di mana negara Inggris sangat memerhatikan pendidikan untuk negeri jajahannya. Hal ini tentunya berbeda dengan Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda. Belanda hanya ingin mengerut kekayaan negara jajahannya tanpa memberikan pendidikan yang intensif.⁷

Negara Malaysia dalam mengembangkan pendidikan memiliki sistem pendidikan tersendiri tentunya seperti Negara-negara yang lain. Negara Malaysia memiliki empat tingkatan dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun, kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun jika mereka lulus dalam ujian, jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah menengah selama 2 tahun. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat Cambridge yang dapat digunakan untuk mendaftar ke Universitas dan itu melalui seleksi.⁸

Di Indonesia sistem pendidikan diatur dalam tiga Undang-Undang, yaitu UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), dan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Pendidikan dasar yang pertama yaitu, ditempuh dengan pendidikan sekolah dasar wajib bagi semua anak usia 7-12 tahun untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Terdiri dari 6 tahun pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama yang merupakan jenjang pendidikan lanjutan dimulai pada usia 13 tahun dan berlangsung selama 3 tahun.

Serta dilanjut dengan pendidikan menengah atas setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, siswa melanjutkan ke SMA/SMK untuk mengikuti pendidikan

⁷ Umi, Tatag, dan Muhammad. 2023. Pendidikan di Negara Malaysia, hal 4.

⁸ Drs. Abd, Rachman Assegaf. 2003. Internasionalisasi Pendidikan Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat. Yogyakarta, Gama Media, hlm, 118

selama 3 tahun. Usia mulai rata-rata adalah 16 tahun. Setelah adanya wajib belajar tersebut, maka selanjutnya bias melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih yang tinggi, salah satunya ke perguruan tinggi.

Dasar pendidikan sangatlah penting untuk mengetahui ideologi dari sebuah negara , seperti di negara Indonesia yang memiliki dasar pendidikan pancasila dan UUD RI 1945 sebagai dasar dan ideologi dalam mengembangkan sebuah pendidikan. Sedangkan di negara Malaysia tentunya juga memiliki dasar pendidikan tersendiri yaitu “Dasar pendidikan kebangsaan”. Dasar pendidikan ini sudah diterapkan sejak tahun 1957. Tentunya lebih dahulu Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 dan membuat UUD RI tahun 1945.⁹

3. Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Kurikulum pendidikan di Indonesia kurang lebih sudah mengalami perubahan sebanyak 11 kali.¹⁰ Mulai tahun 1947-sekarang. Pada Kurikulum 1947, Fokus pelajaran lebih ke arah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, tidak banyak porsi untuk pendidikan pikiran.

Dalam Kurikulum 1952, terjadi perubahan signifikan di mana setiap guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Rencana Pelajaran Terurai 1952 sudah mencerminkan sistem pendidikan nasional, bukan lagi berada dalam masa transisi seperti Rencana Pelajaran 1947. Pada Rencana Pendidikan 1964, pembelajaran di tingkat SD difokuskan pada program Pancawardhana, yang terdiri dari aspek keterampilan, jasmani, emosional atau artistik, kecerdasan, dan pengembangan moral.

Materi dalam Kurikulum 1968 cenderung bersifat teoritis dan kurang relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan perubahan besar dibandingkan dengan kurikulum pendidikan sebelumnya. Tujuan dari kegiatan pembelajaran adalah untuk meningkatkan keterampilan, kecerdasan, serta kesehatan fisik siswa di semua tingkatan pendidikan. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1984 dan diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perubahan yang paling penting adalah peralihan dari sistem semester ke sistem caturwulan, di mana satu tahun terbagi menjadi tiga tahap dengan harapan agar siswa dapat menerima lebih banyak pelajaran. Selanjutnya, KTSP

⁹ Umi, Tatag, dan Muhammad, Op.Cit, hal 6.

¹⁰ Rahman, Yudi Ardian. 2017 "Analisis Perbandingan Pengembangan Kurikulum Negara Asian Tenggara:(Indonesia-Singapura-Malaysia)." *Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Islam*. hlm.2

disusun untuk menjaga agar pendidikan tetap sesuai dengan karakteristik dan potensi setiap daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Dalam KTSP, pemerintah pusat hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Kurangnya pemahaman menyebabkan Kurikulum 2006 dianggap kurang berhasil dan dihentikan pada tahun 2012. Kurikulum ini mencakup empat area penilaian, termasuk sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, dalam Kurikulum 2013, terdapat penambahan materi dalam bidang Matematika, serta penyederhanaan dalam materi Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, dan lain-lain. Standar dalam mata pelajaran IPA dan Matematika ditingkatkan menjadi standar internasional (TIMSS dan PISA). Tujuannya adalah untuk menjadikan pendidikan di Indonesia setara dengan negara-negara lainnya, meskipun pada akhirnya tetap terdapat beberapa kekurangan yang perlu diatasi.

4. Kurikulum Pendidikan di Malaysia

Pada tahun 2015, dunia pendidikan Malaysia menerima data ranking versi OECD yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan Malaysia berada diperingkat 52 dari 76 negara. Pendidikan di Malaysia merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan dari pra-sekolah sampai perguruan tinggi. Pendidikan pra-tersier (dari pra-sekolah sampai pendidikan menengah) adalah di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan Malaysia sementara pendidikan tersier pula adalah di bawah tanggung jawab Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.¹¹

Sebagai sebuah negara yang tergolong sebagai negara berkembang di dunia ketiga, Malaysia sering mengadakan perubahan dan penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan tren pendidikan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Perubahan kurikulum tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pembangunan manusia dan negara.¹²

Kurikulum Nasional adalah program pendidikan yang meliputi semua aspek pengetahuan, keterampilan, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan kepercayaan. Kurikulum Nasional terdiri dari dua bagian utama:

¹¹ Kementerian Pelajaran Malaysia. 2012. Dasar Pendidikan Kebangsaan. Malaysia: Giga Wise Network SDN BHD

¹² Rahman, Yudi Ardian. 2017 "Analisis Perbandingan Pengembangan Kurikulum Negara Asian Tenggara:(Indonesia-Singapura-Malaysia)." *Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Islam*. hlm.8

1. Kurikulum Asuhan dan Pendidikan Awal Anak (KAPAA)

Kurikulum Asuhan dan Pendidikan Awal Anak bertujuan untuk memberikan perawatan dan pendidikan awal yang berkualitas kepada anak-anak dan memberikan peluang belajar yang merangsang pikiran mereka mulai dari lahir hingga usia 4 tahun. Fokus kurikulum ini adalah pada pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik, yang mencakup aspek fisik, emosional, spiritual, intelektual, dan sosial.

2. Kurikulum Standard Pra-sekolah Kebangsaan (KSPK)

KSPK bertujuan untuk mengembangkan potensi anak usia 4-6 tahun secara menyeluruh dan terpadu dalam aspek fisik, emosional, spiritual, intelektual, dan sosial melalui lingkungan pembelajaran yang aman, sehat, serta kegiatan yang kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan anak, memupuk rasa percaya diri, dan mempersiapkan mereka untuk memasuki pendidikan formal.

3. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

merupakan program pendidikan yang menyeluruh dan terpadu dalam struktur konten, pendekatan pembelajaran, serta materi ajar. Tujuan utama KBSR adalah untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh, menciptakan manusia yang seimbang, harmonis, dan berakhlak baik. Komponen pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai diintegrasikan dalam semua aspek kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

4. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

diterapkan secara bertahap mulai dari tahun 2011 dengan dimulai pada murid kelas 1. KSSR bertujuan untuk mengoptimalkan potensi individu secara holistik, menciptakan manusia yang seimbang, harmonis, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan kritis, kreatif, inovatif, dan keterampilan manusiawi sebagai persiapan menghadapi tantangan di era saat ini dan abad ke-21.

5. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kemampuan, keterampilan, minat, dan bakat siswa. Kurikulum ini juga memberikan siswa peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka atau memasuki dunia kerja.¹³

¹³ Salam. 2012. Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.hlm.57-58

D. Kesimpulan

Perbandingan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia mengungkapkan adanya beberapa persamaan dan perbedaan yang mencolok terkait dengan kurikulum dan sistem pendidikan.

Pertama, kedua negara memiliki berbagai jenis kurikulum yang telah berkembang seiring waktu, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fokus kurikulum antara keduanya, yang tercermin dalam penekanan pada aspek seperti pengetahuan, keterampilan, nilai, dan budaya. Kedua, sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal struktur organisasi, kebijakan pendidikan, dan metode pembelajaran. Indonesia menerapkan sistem pendidikan yang terdesentralisasi, di mana tanggung jawab pendidikan dipisahkan antara pemerintah pusat dan daerah, sementara Malaysia cenderung menggunakan pendekatan yang lebih terpusat.

Dengan demikian, sementara terdapat persamaan dalam pendidikan antara kedua negara, perbedaan signifikan dalam kurikulum dan sistem pendidikan mereka menunjukkan pentingnya terus melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan relevansi dan efektivitas pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Dengan demikian, kedua negara dapat mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat mereka.

Daftar Pustaka

- Drs. Abd, Rachman Assegaf. 2003. Internasionalisasi Pendidikan Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat. Yogyakarta, Gama Media.
- Cooper, H. (2016). Research Synthesis and Meta-Analysis (5th ed., Vol. 2). Duke University.
- Hasthoro, Handoko Arwi, dan Nanik Ambarwati, Analisis Sebaran Guru Dikdasmen di Wilayah 3 T (Terluar, Terdepan Dan Tertinggal): Tinjauan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).
- Mahpudz, Asep, Amiruddin Kade, dan Harudin Haerudin, "Analisis Kebijakan Dan Kelayakan Mutu Tenaga Pendidik Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Tengah," Media Litbang Sulteng 2, no. 2 (21 Februari, 2012): hal. 3, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/MLS/article/view/52>
- Kementerian Pelajaran Malaysia. 2012. Dasar Pendidikan Kebangsaan. Malaysia: Giga Wise Network SDN BHD
- Rahman, Yudi Ardian. "Analisis Perbandingan Pengembangan Kurikulum Negara Asian Tenggara:(Indonesia-Singapura-Malaysia)." *Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Islam* 1.1 (2017).
- Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, (Rajawali Press, Jakarta, 2010)
- Salam. 2012. Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.
- Umi, Tatag, dan Muhammad. 2023. Pendidikan di Negara Malaysia.